

BAB II LITERATUR REVIEW

2.1. *Habitus, Field dan Capital*

Habitus adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (*durable, transposable, disposition*) yang berfungsi sebagai basis generative bagi praktik- praktik yang telah tersusun secara sistematis serta terpadu secara objektif. (Richard, 2004).

Habitus asalnya dari bahasa latin sejatinya mengacuk terhadap penampakan, kondisional, serta habitual yang melekat pada diri atau tubuh (Richard, 2004). Habitus yang merupakan cerminan dari seorang individu akan melakukan sesuatu sesuai dengan pemahaman selama hidupnya dan pastinya akan mengacu pada sejarah dan pemahaman yang dimilikinya. Habitus yang mengacu pada pemahaman sejarah dan pengatahuannya adalah sesuatu yang dapat diterima apa adanya. Habitus ini adalah proses produksi yang harus menyesuaikan hubungan antara habitus personal kedalam suatu pemahaman sejarah secara kolektiv dan harus berlanjut secara konsisten sesuai dengan zaman yang berlaku. Atas dasar pemahaman tersebut maka secara formal Pierre Bourdieu membuat defenisi habitus sebagai berikut :

Sistem Kerangka kerja yang tahan lama dan dapat dipindahkan (*transposable*), struktur terorganisir yang diharapkan untuk berfungsi sebagai struktur yang terorganisir (*organized structures inclined to work as organizing structures*), khususnya sebagai aturan yang memunculkan penggambaran praktik. dan penggambaran - penggambaran yang dapat disesuaikan secara imparisial

dengan hasil tanpa menerima upaya yang disadari untuk mencapai tujuan tertentu atau otoritas cepat dari metode dan kegiatan yang diharapkan untuk mencapainya. Karena mereka 'teratur' dan 'berkala' secara adil, namun bukan hasil konsistensi pada pedoman, prinsip-prinsip ini bisa disatupadukan secara kolektif tanpa harus menjadi produk tindakan pengorganisasian seorang pelaku”

Berdasarkan definisi Bourdieu diatas yang menjadi disposisi-disposisi direpresentasikan oleh habitus bersifat:

1. Kemampuan bertahan yang lama atau bertahan di dalam rentan waktu yang khusus pada kehidupan seorang agent
2. Bisa dipindahkan atau sanggup menciptakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai medan dengan aktiviti yang bervariasi.
3. Struktural yang distrukturisasi atau Kondisi sosial harus diikutsertakan dalam pembentukannya secara objektif. Sehingga tak heran jika habitus yang dimiliki oleh agen yang berasal dari strata sosial yang sama akan membentuk habitus yang sama pula.
4. Struktural yang Mestrukturkan atau dapat menciptakan perilaku-prilaku yang relevan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Habitus dalam Kekuasaan bangsawan tidak terlepas dari beberapa hal yaitu, pertama, Tingkah laku para aristocrat yang menjadi habitus menjadi penentu untuk memperoleh simpati masyarakat dalam kontestasi politik. Kedua, Modal yang dimiliki kalangan Andi menjadi *tools* dalam berkontestasi serta Modal simbolik menjadi alat paling dominan para Andi dalam mendapatkan dukungan dalam kontestasi pilkada, gabungan antara habitus dan modal menjadi

faktor yang berpengaruh dalam kemenangan bangsawan dalam arena kontestasi pilkada (Fitriani, 2014).

Setiap habitus sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan agen dalam mempertahankan posisi dan akumulasi modal, karena berperan dalam strategis reproduksi dengan mempresentasikan tipe kondisi sosial dan ekonomi yang dimiliki. Untuk itu habitus sejatinya melakukan fungsi berikut: yaitu pertama, sebagai dasar atau pedoman bagi individu untuk menggunakan akal atau logika dalam menganalisis suatu hal sebagai titik awal dalam memberikan pemahaman tentang sesuatu berdasarkan data historis dan pengetahuan yang mereka miliki. Kedua, sebagai bentuk penilaian dan bentuk interaksi antara seseorang dan lingkungannya, misalnya, seperti yang dikatakan seseorang, berperilaku dan melihat sesuatu. ketiga Basis atau dasar orang dalam tindakannya atau tindakanyaharus berdasarkan apa yang dipahami dan diketahui oleh fikiran, yang dipengaruhi oleh lingkungan, dan didasarkan pada pengalaman hidup.

Sebagai part yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh individu, fikiran dan kehidupan seseorang ini sebagai kausalitas persepsi yang telah merasuk dalam diri seseorang yang ditunjukkan dari kecenderungan atau kualitas individu dalam bertindak. Terlepas dari kenyataan bahwa itu telah menjadi merek dagang individu, habitus tidak bermaksud untuk menjadi struktur yang tetap dan konstan namun lebih disesuaikan dengan kondisi dan minat tunggal seseorang. Habitus yang dilakukan oleh para bangsawan ini tercermin dengan adanya upaya meningkatkan pengetahuan mereka di jalur pendidikan formal setinggi-tingginya sebagai persiapan untuk menjadi seorang pemimpin.

Habitus akan produksi kultural para bangsawan pada masa lampau karena ditunjang dengan modal lainnya, seperti modal simbolik sebagai wacana kepemilikan kelas atas penguasaan pada arena kultural. Dimana berlakunya sistem perbedaan terhadap kelas atas serta menengah yang dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Hal ini kemudian membentuk habitus bahwa hanya kelas atas dan menengah termasuk golongan bangsawan ini yang memiliki hak untuk eksis dalam ranah pendidikan. Selain ditunjang modal simbolik, adanya penguasaan tanah serta kepemilikan harta benda yang merupakan kepemilikan modal ekonomi menjadi nilai tambah bagi para bangsawan ini.

Menjadi tuan tanah dengan sendirinya mendatangkan kehormatan serta para bawahan yang menjadi klien sang Bangsawan. Hadirnya para klien ini sebagai manifestasi bahwa bangsawangan memiliki basis massa yang tetap. Habitus dari bangsawan di setiap daerah yang menjadi tuan tanah memproduksi wacana kekuatan serta kuasa akan kemampuan para bangsawan yang memiliki klien atau pengikut yang setia.

Selanjutnya konsep habitus itu sendiri tidak dapat bekerja tanpa adanya arena, untuk itu habitus dan arena itu tidak dapat dipisahkan, karena merupakan konsep dasar yang saling berkaitan antara hubungan dua arah yakni struktur-struktur obyektif (struktur-struktur bidang sosial) dan struktur-struktur yang telah terintegrasi pada pelaku (struktur-struktur habitus). Konsep arena perjuangan merupakan penentu dalam lingkungan masyarakat termasuk hal yang menyangkut arena kuasa, dimana dalam mewujudkan kepentingan politik para aktor tentunya membutuhkan wilayah atau arena bermain dalam mencapai keinginannya yakni

berkuasa dan mendominasi. Konsep *field* yang diperkenalkan oleh Bourdieu adalah sebuah tempat atau arena sosial dimana orang berlomba-lomba menyusun berbagai strategi dan berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang diinginkannya berupa wujud kekuasaan yang terlegitimasi.

Konsep arena adalah sebuah konsepsi yang dapat berubah pergerakan posisi agent berefek kepada berpindahnya struktur arena. Dalam *field* setiap pelaku politik yang memiliki posisi berbeda dapat diakses atau membuat posisi baru yang akan dilibatkan dengan para penantang lain yang akan bersaing untuk mengendalikan kepentingan atau aset di bidang yang menjadi perhatian. Proses Kampanye adalah salah satu metodologi lapangan yang digunakan oleh Agent / elit Politik untuk meningkatkan dukungan dari masyarakat hal ini terkenal sebagai prosedur mendorong kursi otoritas di panggung politik. Selanjutnya, Pierre Bourdieu pada pemikirannya kemudian ditranslate oleh Maizer mengemukakan tiga bagian didalam proses mengkaji suatu arena yaitu : Pertama, membandingkan dominasi arena kuasa dengan mencari hubungan tiap-tiap arena khusus kedalam arena politis. Kedua, Pemetaan struktur yang objektif antara relasi dan posisi dalam arena yang telah ditentukan. Ketiga, memastikan hakekat habitus para elit yang menempati posisi yang berbeda di dalam arena tersebut. (Maizer, 2009).

Selain kedua konsep tentang habitus dan field digunakan dalam penulisan, konsep lain dari pemikiran Pierre Bourdieu yakni mengenai *capital* (modal) berupa sumber daya yang dimiliki oleh para aktor/elit kemudian dimanfaatkan dalam berkontestasi dalam sebuah arena (*field*).

Menurut Bourdieu (dalam George Ritzer, 2011) terdapat empat tipe modal (capital) tersebut yakni:

Pertama yaitu Modal Ekonomi dimana individu diharuskan mempunyai harta benda, finansial, kepemilikan materi dan lain-lain. Modal ekonomi ini merupakan modal yang mudah diubah menjadi modal yang lain bergantung bagaimana elit memainkan agent untuk bekerja lebih keras untuk mencari modal lain dengan memanfaatkan modal ekonomi. Kemunculan modal ini merupakan pemikiran Marx yang mengklasifikasi kelas yang berbeda dalam masyarakat. Marx mengungkapkan bahwa strata atau level dalam masyarakat dapat dilihat dari kepemilikan modal ekonomi.

Selanjutnya yang Kedua yaitu modal kultural yang bergantung bagaimana individu dapat memanfaatkan kepemilikan personal branding terhadap kebudayaan, strata pendidikan dan penghargaan yang dimiliki seseorang. Bentuk nyata dari capital ini adalah bukti kepemilikan ijazah pendidikan dan penghargaan-penghargaan yang dimiliki oleh individunya. Kemudian keterampilan dalam hidup bermasyarakat dapat menjadikan modal ini semakin kuat dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Ketiga yaitu modal simbolik, capital ini sejatinya diperoleh dari legitimasi kehormatan dari garis darah keluarga bangsawan atau aristocrat. Capital simbolik ini mempunyai nilai tawar yang tinggi karena modal ini hanya dimiliki oleh individu tertentu dan tidak dimiliki oleh masyarakat biasa. Tetapi meskipun modal ini diturunkan tetap harus mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena tidak semua keturunan bangsawan mengikuti jejak pendahulunya

Keempat, Modal sosial yaitu modal yang dimiliki elit berdasarkan bangunan relasi dan jaringan sosial yang telah dibangun dengan baik di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tak ada sekat antara elit dan masyarakat biasa sehingga mendapat perhatian khusus dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilihnya dalam kontestasi. Menurut Pierre Bourdieu terdapat 4 (empat) tipe modal sosial:

1. Kemampuan membangun relasi dengan Masyarakat
2. Mendapatkan legitimasi yang dua arah, bukan mengakui tapi diakui.
3. Kemampuan struktural
4. Bentuk dari struktur yang dibangun dalam masyarakat

Modal dalam kontestasi politik yang dimiliki oleh keluarga politik bersumber dari warisan sumber daya dari Pemimpin terdahulu yang tidak lain adalah keluarga besarnya. Modal tersebut adalah modal simbolik, modal ekonomi, modal cultural dan modal social. Modal dari hasil warisan kekuatan keluarga punya pengaruh besar calon kandidat dalam kemenangannya pada Pemilihan Kepala Daerah (Zaldi, 2017).

2.2 Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan yang digunakan untuk mendapatkan kuasa dengan cara mempengaruhi orang lain agar dapat diorganisir dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian kekuasaan politik merupakan suatu kemampuan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk mengkonversi sumber kekuatan menjadi penguasa dengan skala kekuasaan yang lebih besar (Budiarjo, 2008). Teori kekuasaan Max Weber

dan teori fungsional *struktural talcoot parsons*. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang lain berperilaku sesuai dengan kehendaknya (Rafael, 2001).

Menurut Foucault (dalam Mudhoffir 2014) Kekuasaan merupakan sebuah konsep untuk mendeskripsikan sebuah situasi strategi yang rumit dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan merupakan sebuah kemampuan untuk membangun relasi dan hubungan yang bervariasi dengan kekuatan lain agar dapat mendapatkan ruang lingkup yang lebih strategis. Sedangkan Menurut Winters Kekuasaan adalah sebuah konsep yang sukar didefinisikan dan mempunyai pengaruh bukan karna penggunaannya namun pihak lain yang mengantisipasi penggunaannya. Kemudian Winters mengemukakan lima sumber daya kekuasaan individual, yaitu kekuasaan hak politik, kekuasaan jabatan resmi dalam pemerintah atau organisasi, kekuasaan pemaksaan (koersif), kekuasaan mobilisasi, dan kekuasaan yang terakhir yaitu kekuasaan material Kekuasaan Material inilah Sumber yang menyediakan dasar tegaknya oligark sebagai bentuk (yang paling luwes adalah uang tunai) sudah lama dikenali sebagai sumber kekuasaan ekonomi sosial dan politik (Winters, 2011).

Di Indonesia setelah era reformasi, oligarki menjadi kolektif banyak tokoh-tokoh mafia yang sangat kaya dan mendominasi daerah atau bidang tertentu. Kesempatan dalam berkuasa hanya dimiliki oleh para elit, pelaku ekonomi mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk masuk dalam kekuasaan berpolitik. Bangsa Indonesia sekarang lebih bebas, dan para oligarknya bergerak sendiri-sendiri. Mereka menggunakan sumber daya kekuasaan material untuk

mempertahankan kekayaan dan harta dalam ekonomi politik yang penuh ancaman dan ketidakpastian (Winters, 2011).

2.3. Konsep Bangsawan

Bangsawan secara harfiah adalah aristokrat, yang merupakan orang terpadang dengan asal usul keturunan para raja (Samsuddin & Bujang, 2013). Sementara Rapar mengemukakan bahwa bangsawan itu terlahir untuk memerintah dengan penuh kebajikan, keadilan, kebijaksanaan dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat secara merata. (Rapar, 1988).

Menurut Raestyawati Bangsawan merupakan sekelompok elit dalam masyarakat, di mana mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar. Hal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun dari orang tua kepada anak (Raesyawati, 2015).

Lapisan Bangsawan disebut juga kaum ningrat yang diisi oleh golongan priyai yang berasal dari keturunan raja-raja dan menempati urutan tertinggi dalam tata urutan. Seorang sultan mempunyai kedudukan keramat, tetapi juga para pangeran, dan pejabat-pejabat lain dalam negara. Gelar sakral juga disesuaikan dengan kedudukan, tinggi atau rendah, besar dan kecilnya kekuasaan, dekat atau jauhnya seseorang dari sultan. (Chandra, 2018).

Kaum Bangsawan/Keluarga Bangsawan Merupakan strata sosial yang tinggi dan dihormati di Sulawesi Selatan. Keluarga bangsawan pada umumnya mempunyai tanah yang luas, dan bekerja sebagai pegawai pemerintah dan politisi (Puwaningsih, 2015).

Ada beberapa hal yang membuat kelompok bangsawan Bone bisa bertahan hingga waktu yang lama didalam setiap pergulatan. Pertama ada sebuah mitos yang dikenal to-manurung artinya simbol *legitimacy* untuk semua kerajaan besar di wilayah Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan Bone dan stilah to-manurung sudah menjadi tradisi lisan dari turun temurun bagi masyarakat Bone hingga jadi suatu kepercayaan. Kedua keterbatasan pemahaman budaya dan sejarah oleh Kolonial Hindia Belanda dalam membuat *road map* daerah ini. Kolonial Hindia Belanda lebih fokus pada kekuasaan pemerintahannya daripada merawat hubungan dengan para raja atau bangsawan dan rakyat. Ketiga Kolonial Hindia Belanda melakukan hubungan perkawinan politik dengan elite bangsawan Bone sebagai strategi kekuasaan dalam memperluas jaringan kerajaan dan bangsawan Bone. (Mapangara, 2010).

Kekuatan Simbol elit dan tradisi Bangsawan dalam dinamika politik local diakibatkan oleh kewenangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang membuat kaum aristocrat dapat dengan mudah mengendalikan semua proses politik dengan melalui legitimasi kepercayaan To-Manurung yang merupakan tradisi dan symbol aristocrat. Kemudian. Pola pikir yang dimiliki masyarakat Soppeng mengalami perkembangan seiring dengan semakin berkembangnya kondisi social masyarakat. Terakhir, Pola symbol dan tradisi Aristokrat dilestarikan untuk alat penguatan kekuasaan Bangsawan Soppeng (Muhaemin, 2016).

2.4. Patronase Politik

Martin Sheffter (dalam Edward, 2015) mengemukakan bahwa patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik mereka. Sementara menurut Paul Hutchcroft patronase juga merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada kelompok komunitas.

Menurut Scott hubungan patronase merupakan sesuatu relasi yang dibangun antara dua orang atau lebih dengan memainkan instrumen dimana individu yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi akan dijadikan sebagai patron dan sebaliknya yang mempunyai posisi nilai tawar yang rendah akan menjadi klien, hubungan antara patron dan klient tersebut akan terjadi jika ada kepentingan yang meberikan status saling menguntungkan. Seperti patron meberikan sumber daya ekonomi dan klient memberikan dukungan politik kepada sang patron (Scott, 2014).

Menurut Scott (dalam Heddy, 2007) gejala patronase diakibatkan oleh tiga hal, yaitu: pertama, Adanya perbedaan yang mencolok dalam kepemilikan sumber daya ekonomi, social, maupun kekuasaan, sehingga patron akan lebih mudah mendapatkan klien yang mempunyai sumber daya yang rendah. Kedua, tidak adanya kepastian jaminan keamanan dalam control social sehingga otomatis seseorang akan mencari patron untuk mendapatkan perlindungan pribadi sebagai

klien. Ketiga yaitu diakibatkan oleh tidak terjalannya ikatan kekeluargaan yang dapat diandalkan dalam mendapatkan jaminan dan dukungan dari circle kekeluargaan.

Hubungan Patron-Klien dalam Politik lebih spesifik dijelaskan sebagai transaksi barang dan jasa serta keutungan lainnya antara patron sebagai pemilik sumber daya dominan dan klien sebagai penerima barang dan jasa untuk dikonversikan menjadi dukungan politik (Pratama, 2017). Kemudian dalam tulisan pada kamus latin disebutkan bahwa Patron yaitu artinya pelindung dan klien yang diartikan sebagai yang dilindungi. Jadi intinya adalah hubungan patronase awalnya terjadi karena untuk menggambarkan relasi antar orang yang melindungi (bangsawan) dengan orang yang buruh perlindungan (orang biasa) (Prent,1969).

Jaringan patronase politik di dalam pemerintah daerah. Jaringan ini menciptakan hubungan patron-klien dengan menekankan dominasi kekuasaan pada *local strongman*. Ini menunjukkan bahwa perlindungan politik bukanlah hal yang baik dalam pemerintahan. Rantai patronase yang membentuk dinasti mampu membungkam masyarakat sehingga demokrasi tampaknya dihapuskan. Pemerintahan semacam ini biasanya mampu mengendalikan sektor ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat kurang diperhatikan. Karena itu, orang akan lebih suka tunduk pada penguasa daripada menolak. Keberhasilan jaringan patronase ini menyebabkan munculnya budaya politik baru dari dinasti politik (Ikmal, 2018).

Ikatan patronase bersumber dari kekerabatan dengan pemimpin sebelumnya yang memberikan banyak keuntungan kepada pasangan kandidat dalam kontestasi politik karena dapat meningkatkan popularitas calon yang memiliki kekerabatan dengan penguasa sebelumnya. Politik Kekerabatan sejatinya tidak bisa lepas dari kultur politik neo-patrimonialisme. Budaya politik neo-patrimonialisme sangat erat kaitannya dengan politik kekerabatan karena kasusnya mirip dengan penyalahgunaan wewenang yang menghasilkan hubungan patron-klien yang memberikan pengaruh besar untuk meraup suara dalam kontestasi Pilkada (Pamungkas, 2018).

2.5. Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich (dalam Budiarjo 2008), Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat duniawi dan materiil. Kemudian Menurut Syafii Partai politik adalah sekelompok orang – orang memiliki ideologi yang sama, berniat merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan membela perjuangan kebenaran (Syafii, 2005).

Sigmund Neuman (dalam Budiarjo, 2008) mengemukakan bahwa partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Sementara Huntington menyebutkan bahwa ada dua kriteria sistem

kepartaian yang kokoh. Pertama, partai memiliki kapasitas melancarkan perluasan peran serta politik melalui jalur partai dan dengan demikian mengalihkan segala aktivitas anomik dan revolusioner. Kedua, ia mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi agar mengarungi kadar tekanan yang dihadapi oleh sistem politik. Dalam perspektif ini sebagaimana dinyatakan Huntington, jumlah partai politik hanya akan menjadi penting bila mempengaruhi kapasitas sistem untuk menyajikan saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan bagi stabilisasi politik (Huntington, 2004).

2.6. Birokrasi

Menurut Weber Birokrasi merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional (Weber, 1947). Kemudian Menurut Sedarmayanti birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan (Serdamayanti, 2009).

Menurut Albrow Birokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh suatu pihak yang umumnya disebut sebagai official, lembaga eksekutif pemerintah, seluruh pejabat pemerintah baik skala besar ataupun kecil (Albrow, 2006). Kemudian Menurut Martin Albrow (dalam Ahmad, 2008) birokrasi adalah bentuk organisasi kekuasaan yang sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat resmi atau aparat pemerintah yang memiliki syarat technical skill yaitu berkemampuan secara teknis melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya di dalam sistem administrasi pemerintahan

(Robbins, 2006) mengutip konsep birokrasi ideal dari Weber yang terdiri dari 7 elemen, sebagai berikut:

- 1) Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi, yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
- 2) Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang formal, dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi.
- 3) Spesialisasi pekerjaan, yaitu semua pekerjaan dilakukan dalam kesederhanaan, rutinitas dan mendefinisikan tugas dengan baik.
- 4) Formalitas yang tinggi yang merupakan suatu bentuk penyesuaian formal bagi seluruh anggota dalam birokrasi dengan bentuk pemberian pendidikan formal maupun pelatihan.
- 5) Segala sesuatu yang berkaitan dengan penempatan pegawai dalam organisasi harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai.
- 6) Sifatnya tidak individual atau impersonalitas.
- 7) Mempunyai jejak karir bagi anggota organisasi dan mendorong pegawai untuk mencapai puncak kemampuan karir dalam organisasi.

2.7. Sistem Politik

Menurut Almond dan Powel (Dalam Winarno, 2007) Sistem Politik adalah semua interaksi yang mempengaruhi semua penggunaan paksaan fisik yang sah,

dalam hal ini sistem politik memasukkan tidak hanya institusi pemerintahan, seperti legislasi, hukum, dan agen-agen administratif, tetapi semua struktur dalam aspek-aspek politik. Namun, tidak berarti bahwa sistem politik hanya berkenaan dengan kekuasaan, kekerasan, ataupun paksaan, tetapi juga relasi paksaan tersebut berada dalam kualitas yang khas, sistem politik juga tidak hanya membuat peraturan dan melaksanakannya, tetapi aturan itu pelaksanaannya didukung oleh paksaan. Almond dan Powel menambahkan bahwa sistem politik akan di pengaruhi sistem-sistem ekonomi domestik, sumber-sumber alam dan lingkungan alamiah mereka, sistem pendidikan dan teknologi, dan sistem-sistem etnik dan kebudayaan mereka.

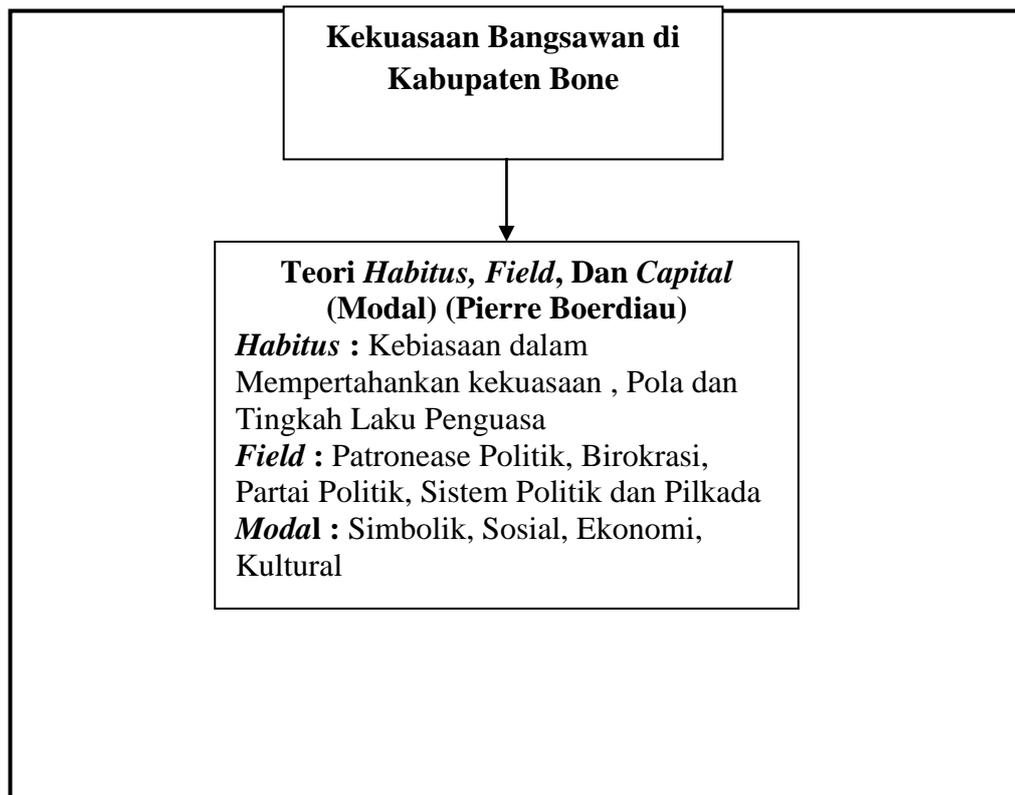
Sistem politik di Indoensia Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam sistem politik di Indonesia membutuhkan biaya demokrasi yang begitu besar. kebutuhan dana kampanye dalam pilkada sangat besar. Hasil kajian penelitian dan pengembangan Kementrian Dalam Negeri memperkirakan biaya kampanye untuk pemilihan gubernur berkisar Rp20 miliar hingga Rp100 miliar sedangkan untuk pemilihan bupati / walikota berkisar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Sruktur kesempatan dalam sistem politik sangat dipengaruhi oleh Popularitas dan Elitisme pelaku politik (Tedjo, 2018).

Kemudian dalam Pilkada di Indonesia tidak terdapat partai yang seutuhnya idealdalam memberikan peluang kepada kadernya untuk meberikan masukan yang dapat merubah keputusan, hamper semua ditentukan oleh elit partai. Sehingga tidak dapat dihindarkan proses pada setiap tahapan pilkada tidaklah murah karena kompromi harus dibangun dengan elit partai yang tentunya

membutuhkan financial untuk membiayai proses kampanye yang membutuhkan mobilisasi massa yang tidak sedikit. (Firman, 2018).

2.8. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



2.9 Defenisi Konsepsional

1. Bangsawan adalah sekelompok elit dalam masyarakat yang mempunyai gelar atas dasar keturunan raja, bangsawan ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar.

2. Kekuasaan adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu
3. *Habitus* berkaitan dengan kebiasaan bangsawan dalam menjaga kekuasaannya baik secara tradisional hingga bertransformasi ke politik modern. Dengan melihat kebiasaan ini tentunya dapat memberi gambaran mengenai perilaku bangsawan dalam mengikuti alur perpolitikan pada masa kini.
4. *Field* adalah arena atau lahan yang membuka ruang bagi bangsawan ini dalam mempertahankan kekuasaan ataupun mendapatkan kekuasaan tersebut. Serta sebagai upaya mereka untuk tetap eksis dalam sistem politik dan pemerintahan tradisional yang identik dengan feodalisme maupun modern saat ini yang demokratis.
5. *Capital* (modal) adalah sesuatu yang dimiliki serta dimanfaatkan oleh bangsawan digunakan dalam memobilisasi massa atau mendapatkan suara (vote) masyarakat
6. Sistem Politik adalah kesatuan dari seluruh perangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing masing yang bekerja untuk mencapai sebuah tujuan

2.10 Defenisi Operasional

1. Habitus

- Kebiasaan dalam mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan pada masa tradisional hingga politik modern.

- Pola, tingkah laku serta kepribadian Andi dalam berinteraksi dengan masyarakat umum.

2. Field

a. Pilkada

- Kepentingan dalam berkontestasi di pilkada.
- Peluang serta model bertahannya kaum bangsawan.

b. Patronase Birokrasi

- Struktur-struktur sosial dan jaring-jaring sosial yang dibentuk dalam tubuh birokrasi dimana jabatan penting/strategis dikuasai oleh Bangsawan, sebagai lahan dalam meningkatkan serta menunjukkan kapasitas kepemimpinan kaum bangsawan.

c. Patronase Partai Politik

- Partai tempat bergabungnya para Bangsawan, Seperti Golkar, Demokrat.
- Partai Politik sebagai kendaraan politik dalam pencalonan peserta pilkada
- Partai-partai yang berkoalisi dengan para kandidat pada saat kampanye pilkada.

d. Sistem Politik

- Struktur Kesempatan yang dimiliki oleh bangsawan dari segi Popularitas
- Struktur Kesempatan yang dimiliki oleh bangsawan dari segi Kapasitas

3. *Capital* (Modal)

a. Modal Sosial

- Interaksi dengan tokoh masyarakat;
- Relasi-relasi antar pejabat pemerintahan (birokrat);

b. Modal Simbolik

- Gelar yang didapatkan berdasarkan garis keturunan yang secara otomatis mendapatkan legitimasi dari masyarakat lain;
- Gelar yang didapatkan berdasarkan karakter mereka yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

c. Modal Kultural

- Tingkat pendidikan yang dimiliki;
- Penghargaan yang dimiliki

d. Modal Ekonomi

- Kekayaan atau harta benda yang dimiliki bangsawan;
- Sumbangan atau hadiah yang senantiasa diberikan dalam pembangunan fisik dan non fisik.